

BAB III

Gambaran Umum tentang pelaksanaan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali/ PK terhadap Putusan PK yang telah terjadi di Indonesia dalam Perkara Perdata

A. Konsep Peninjauan Kembali (PK)

Penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hirarkis.¹ Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Kekuasaan kehakiman yang independen dapat dilaksanakan apabila hakim mempunyai kekebalan hukum. Kekebalan hukum merupakan kekebalan hakim atas gugatan dalam melaksanakan peradilan (*judicial officers are immune from suit in respect of judicial acts*),² serta kekebalan atas kewajiban atas kewajiban dilakukan penyelidikan atas putusan yang

¹ M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 39. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I).

² Muhammad Yamin, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, h. 74.

dijatuhkan.³ Independensi kekuasaan kehakiman bersifat tidak mutlak, karena independensi kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum, seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen,⁴ bahwa

"the judges are for instance, ordinarily independent that is they are subject only to laws and no to the order (instructions) of superior judicial or administrative organs". Negara menjadi berwibawa karena memiliki kekuasaan kehakiman yang independen, baik dalam aspek kelembagaan, prosedur maupun aspek moralitas hakim.

Aspek kemandirian kelembagaan kekuasaan kehakiman terletak pada adanya pemisahan kekuasaan lembaga kehakiman dengan kekuasaan lembaga negara lainnya. Sir Anthony Mason, menyatakan bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan kepercayaan publik pada lembaga peradilan, karena kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan unsur terpenting suatu negara hukum demokratis.⁵ Terkait hal ini, Sudikno Mertokusumo⁶ menegaskan bahwa kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan agar negara hukum dapat terlaksana. Hal ini berarti bahwa badan peradilan mandiri manakala para pelakunya juga mandiri.

Selintas tentang lembaga *rekes sipil (request-civil)* untuk ranah perdata atau yang saat ini kita kenal sebagai peninjauan kembali (pk) telah lama

³ *Ibid*

⁴ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, h. 275.

⁵ Sir Anthony Mason dalam *Ibid*.

⁶ Sudikno Mertokusumo, "Evaluasi Pengaruh Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Makalah pada Seminar Lima Puluh Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 1995, h. 2.

dikenal dalam peradilan di Indonesia, dengan memedomani pasal 395 Rv melalui *doktrin doelmatigheid* atau kepentingan beracara.⁷

Dalam pasal 385 Rv dijelaskan bahwa “putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dapat ditarik kembali atas permintaan seseorang yang pernah menjadi salah satu pihak atau seseorang yang terpenggil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan.
- b. Jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut
- c. Jika ada kelalaian memberi putusan tentang sebagian dari tuntutan
- d. Terdapat dua putusan yang saling bertentangan
- e. Putusan dijatuhkan berdasarkan surat yang diakui kemudian palsu
- f. Ditemukan novum berupa surat-surat yang bersifat menentukan

Dalam PERMA No 1 Tahun 1969 dijelaskan alasan PK perkara perdata:

- a. Putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok.
- b. Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut.
- c. Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- d. Terdapat putusan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama.

⁷ Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta; Sinar Grafika. 2007

- e. Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau keterangan saksi atau surat-surat bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- g. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat dikemukakan (*novum*).⁸

Upaya hukum peninjauan kembali dikategorikan kepada upaya hukum luar biasa, karena didalamnya adalah hal yang luar biasa. Pemeriksaan keistimewaan adalah sarana ini dipergunakan untuk membuka kembali (mengungkit) suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali sangat dibatasi dengan syarat-syarat tersendiri yang diatur dalam pasal 269 KUHAP dan dasar pokok diatur dalam pasal 21 UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.⁹

B. Tatacara Permohonan dan Pengiriman Berkas Perkara

- a. Yang berhak mengajukan permohonan PK

Yang berhak untuk mengajukan permohonan PK adalah:

- 1. Para pihak yang berperkara
- 2. Para ahli waris

⁸ Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta;Sinar Grafika. 2007.

⁹ Osman Simanjuntak. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta;Anggota IKAPII. 1995.

3. Seorang wakil yang bertindak sebagai kuasa

b. Syarat permohonan PK

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan PK antara lain:

1. Berkas permohonan peninjauan kembali diajukan kepada MA melalui ketua pengadilan tingkat pertama, hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat 1 UU MA. Berkas Permohonan peninjauan kembali dimasukkan pada bagian kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, bukan dimasukkan pada kepaniteraan MA.
2. Membayar biaya perkara di kepaniteraan pengadilan tingkat pertama, dan hal ini merupakan syarat formil yang melekat pada setiap pengajuan permohonan berperkara. Demikian halnya dijelaskan pada pasal 70 ayat 1 UU MA, yang mensyaratkan agar permohonan PK dibarengi dengan membayar biaya perkara yang diperlukan, selama biaya perkara belum terbayarkan, maka PK belum didaftarkan.
3. Permohonan diajukan secara tertulis, hal ini berdasarkan pasal 71 ayat 1 UU MA, namun dalam ketentuannya ada pengecualian kepada pemohon yang tidak dapat menulis. Kemudian dalam pasal 71 UU MA mengatur hal-hal yang mesti disebut dalam surat permohonan, minimal surat permohonan itu harus menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar PK karena surat permohonan PK yang tidak menyebutkan alasan yang menjadi dasar permohonan PK dianggap tidak memenuhi syarat dan juga surat permohonan PK

dianggap tidak memenuhi syarat ketika alasan-alasan yang dijasikan dasar permohonan PK tidak sesuai dengan alasan yang ada hubungannya, misal tidak sesuai dengan alasan limitatif yang disebut dalam UU MA pasal 67. Dalam surat permohonan PK tidak dipisahkan antara surat permohonan dengan alasan atau risalah PK.

- c. Memberikan salinan permohonan kepada pihak lawan pemohon, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU MA pasal 72, yang akan dijelaskan seperti dibawah ini:

1. panitera wajib memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan, tugas pertama panitera adalah;

- a) Panitera pengadilan tingkat pertama tersebut wajib memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan.

- b) Pelaksanaan ini ada dua pilihan yaitu, boleh diberikan secara langsung kepada pihak lawan melalui juru sita, atau dapat mengirimkan salinan permohonan itu melalui surat tercatat oleh kantor pos atau badan lain yang bergerak dibidang itu.

- c) tenggang waktu pemberian salinan selambat-lambatnya dalam 14 hari kepada pihak lawan, dan tenggang waktu ini bersifat imperatif, jadi tidak boleh dilampui.

- d) Pihak lawan berhak mengajukan jawaban, karena maksud panitera memberikan salinan adanya permohonan PK adalah agar memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk

memberikan kesempatan pengajuan jawaban, dan hal itu diantara syaratnya;

- a. Kebolehan mengajukan jawaban, terbatas pada alasan pasal 67 huruf a atau b UU MA.
 - b. Tenggang waktu mengajukan jawaban yakni 30 hari setelah pihak lawan menerima salinan permohonan PK.
 - c. Jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama
 - d. Panitera membubuhi cap, hari, serta tanggal penerimaan jawaban.
 - e. Pengiriman berkas perkara PK ke MA
2. Panitera melakukan pengiriman ke MA

Adapun berkas yang dikirim ke MA antara lain:

- a) Berkas perkara yang lengkap, meliputi semua dokumen, berita acara, memori dan memori kontra banding dan kasasi sertaputusan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, itu lah berkas yang harus dikirim ke panitera MA.
 - b) Biaya perkara PA yang dikirim ke panitera MA
3. Tenggang waktu pengiriman berkas perkara PK selambat-lambatnya 30 hari dikirim kepada panitera MA.

C. Ketentuan yang Mengatur Pengajuan Peninjauan Kembali

Ketentuan yang mengatur mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

1. Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

”Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Selanjutnya, Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

Merujuk kepada uraian dan pertanyaan yang diajukan di atas, maka jelas bahwa yang ditanyakan hanyalah terkait dengan ketentuan pada Pasal 67 huruf b *jo.* Pasal 69 huruf b UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul “*Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*”, terdapat 4 (empat) bagian yang

dapat dijelaskan terkait dengan Pasal 67 huruf b *jo.* Pasal 69 huruf b tersebut, yaitu :

1. Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini terbatas hanya pada bentuk Alat Bukti Surat.
2. Alat Bukti Surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini, harus bersifat menentukan.
3. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang.
4. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara.

Terhadap bagian 3 tersebut di atas, maka pada hari dan tanggal ditemukan alat bukti surat itu, pemohon PK harus menyatakan di bawah sumpah dimana :

1. pernyataan sumpah itu dibuat secara tertulis yang menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah menemukan alat bukti surat *in casu* Akta Jual beli ataupun Sertipikat Hak Milik dengan menyebut tempat atau kantor dimana alat bukti surat itu ditemukan.
2. selanjutnya surat pernyataan sumpah itu disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Kedua syarat ini bersifat imperatif dan kumulatif. Artinya, apabila penemuan surat itu tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah, kemudian surat pernyataan sumpah itu tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhi syarat sebagai alasan permohonan PK. Sementara itu, pernyataan sumpah saja oleh Pemohon

PK tanpa disahkan oleh pejabat yang berwenang juga mengakibatkan alat bukti surat tersebut tidak sah sebagai alasan permohonan PK.

Secara sederhana, pernyataan di bawah sumpah tersebut dapat langsung dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan pengesahannya dilakukan oleh pejabat tersebut pada surat yang bersamaan di tempat pembuatan pernyataan sumpah.

Adapun terhadap pengertian "pejabat yang berwenang" pada Pasal 69 huruf b tersebut tidak diberikan penjelasan. Oleh karena tidak diberikan penjelasan, maka tidak terdapat pembatasan atas "pejabat yang berwenang" dalam melakukan pengesahan atas alat bukti surat tersebut. Namun demikian, pada umumnya, jika suatu surat yang akan dijadikan *novum* berkaitan erat dengan pejabat tertentu, maka pernyataan sumpah dan pengesahannya dilakukan di hadapan dan oleh pejabat tersebut.

D. Cara Menghitung Tenggang Waktu PK

Cara menghitung tenggang waktu PK berbeda untuk setiap alasan, meskipun tenggang waktu telah ditentukan, namun cara menghitung mulai berlakunya berbeda pada setiap alasan, seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Alasan huruf a pasal 67 UU MA

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila suatu putusan didasarkan pada sebuah kebohongan pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, maka dengan alasan ini cara menghitung tenggang waktu adalah:

1. 180 hari dari tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan.
 - a) Bukan 180 dari putusan yang bersangkutan BHT.
 - b) Tetapi 180 hari dari tanggal diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut.
 2. 180 hari dari tanggal putusan hakim pidana BHT
 - a) 180 hari dari tanggal putusan hakim pidana yang menyatakan bukti-bukti yang dijadikan dasar putusan adalah palsu.
 - b) Apabila alasan permohonan PK bertitik tolak dari putusan hakim pidana, maka permohonan PK bukan 180 hari dari tanggal putusan hakim pidana BHT.
- b. Alasan huruf b pasal 67 UU MA
- Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang menjadi dasar adalah penentuan surat-surat bukti yang bersifat menentukan atau disebut novum, dan sehubungan dengan hal itu, cara penentuan tenggang waktu adalah:
1. 180 hari dari tanggal ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan tersebut.
 2. Bukan 180 hari dari tanggal putusan BHT
 3. Untuk membuktikan kapan surat ditemukan, maka dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dibawah sumpah.
- c. Alasan huruf c, d, f pasal 67 UU MA

Cara menghitung dari alasan ayat ini adalah dari tanggal putusan BHT dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, yakni 180 hari dari tanggal putusan yang bersangkutan BHT.

d. Alasan pasal 67 huruf e UU MA

Berdasarkan ayat ini yaitu apabila anatar pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatanya telah diberiakn putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Dengan kata lain terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan satu sama lain, dan berdasarkan hal ini penentuan tenggang waktu adalah

- a) Bukan 180 hari dari putusan pertama BHT
- b) Tetapi, 180 hari dari tanggal putusan terakhir atau yang belakang yang berisi pertentangan itu BHT.

Akan tetapi sesuai dengan pasal 69 huruf e UU MA bebrapa tahun setelah putusan BHT masih terbuka hak pengajuan permohonan PK apabila muncul atau terbit putusan pidana atau perdata yang saling bertentangan dengan putusan yang telah BHT maksud.

E. Penemuan Permasalahan Hukum Pada Perdata Khusus, dengan Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK untuk ketiga kalinya yang diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Ke Dua dengan Undang-Undang Nomor 3

tentang Mahkamah Agung menyatakan: “Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Namun demikian dalam praktek terdapat permohonan PK untuk ketiga kalinya yaitu dalam perkara No. 021 PK/Pdt.Sus/2009 yaitu dalam perkara antara :

PT. SAKA UTAMA DEWATA

Lawan

I. PT. Salindo Perdana Finance (DL)

II. PT. Koexim Mandiri Finance

III. Kreditur Sindikasi yang terdiri dari:

1. PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
2. PT. Koexim mandiri Finance
3. PT. Salindo Perdana Finance
4. PT. Equity Development Finance (dahulu PT Gajah Surya Finance)
5. PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
6. PT. Global Multi Financindo (dahulu PT. Swa Dinamika Bakri Finance)
7. PT. Saseka Gelora Finance

Perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PailitV/2003/PN. Niaga Surabaya, dalam perkara ini Perseroan merupakan salah satu anggota sindikasi kredit kepada PT. Saka Utama Dewata melalui PT. Koexim Mandiri Finance yang bertindak sebagai agen sindikasi yang bersama sama dengan PT. Salindo Perdana Finance (dalam likuidasi), (PT. Koexim Mandiri Finance dan PT Salindo Perdana

Finance bertindak sebagai pemohon pailit). Setelah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In Krachtvan Gewisjde) sehubungan dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap PT. Saka Utama Dewata yang berkedudukan di Bali. PT. Koexim Mandiri Finance dan PT. Salindo Perdana Finance serta para kreditur PT. BFI Finance Indonesia Tbk., PT. Koexim mandiri Finance, PT. Salindo Perdana Finance, PT. Equity Development Finance (dahulu PT Gajah Surya Finance), PT. Clipan Finance Indonesia Tbk., PT. Global Multi Financindo (dahulu PT. Swa Dinamika Bakri Finance), PT. Saseka Gelora Finance mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Saka Utama Dewata selaku lease sindikasi atau debitur sindikasi berdasarkan perjanjian lease yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pembayarannya tersebut kepada Pengadilan Niaga Surabaya dengan register kepailitan No. 02/PailitV/2003/PN. Niaga Sby, dimana putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya tanggal 20 Maret 2003 telah memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, menyatakan PT. Saka Utama Dewata berkedudukan di Bali pailit, mengangkat Mahdi Sorolinda Nasution, S.H. sebagai Hakim pengawas, mengangkat Kalisutan, S.H. sebagai kurator, menetapkan imbalan jasa kurator yang akan ditentukan kemudian setelah kurator menjalankan tugasnya, menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.300.000.- dan menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya, dan dimana selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut PT. Saka Utama Dewata mengajukan kasasi kepada

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 05/K/N/2003 telah memutuskan yang intinya mengabulkan permohonan kasasi PT. Saka Utama Dewata, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Surabaya No. 02/PailitV/2003/PN. Niaga Sby tanggal 20 Maret 2003 sehingga berdasarkan putusan kasasi MA tersebut PT. Saka Utama Dewata tidak Pailit.

Terhadap putusan Kasasi MA No. 08/K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 tersebut, PT. Koexim Mandiri Finance dan PT. Salindo Perdana Finance serta para kreditur PT. BFI Finance Indonesia Tbk., PT. Koexim mandiri Finance, PT. Salindo Perdana Finance, PT. Equity Development Finance (dahulu PT Gajah Surya Finance), PT. Clipan Finance Indonesia Tbk., PT. Global Multi Financindo (dahulu PT. Swa Dinamika Bakri Finance), PT. Saseka Gelora Finance mengajukan Permohonan Kembali.

Berikut perincian perkara perdata dalam Peninjauan Kembali/ PK PT. SAKA UTAMA DEWATA, berkedudukan di Jalan Bakung Sari No. 1, Kuta Bali, dalam hal ini member kuasa kepada Iwan Kuswardi, S.H., Advokat berkantor di Jalan Sampeyan No. 51, Malang.

1. Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK pertama oleh PT. SAKA UTAMA

DEWATA melawan :

I. PT. Salindo Perdana Finance (DL)

II. PT. Koexim Mandiri Finance

III. Kreditur Sindikasi yang terdiri dari:

1. PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

2. PT. Koexim mandiri Finance
3. PT. Salindo Perdana Finance
4. PT. Equity Development Finance (dahulu PT Gajah Surya Finance)
5. PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
6. PT. Global Multi Financindo (dahulu PT. Swa Dinamika Bakri Finance)
7. PT. Saseka Gelora Finance

Para Termohon PK dahulu para Pemohon Kasasi I, II, III/ para Kreditur.

Dengan Putusan Peninjauan Kembali/ PK Nomor: 02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006:

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali/ PK dari pemohon Peninjauan Kembali/ PK : PT. SAKA UTAMA DEWATA tersebut;
Mengkukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). “(tanda kursif oleh dan dari Pemohon Peninjauan Kembali)”;

2. Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK Kedua oleh PT. SAKA UTAMA DEWATA melawan PT. Salindo Perdana Finance (DL)

Dengan Putusan Peninjauan Kembali/ PK Nomor: 017 PK/N/ 2006 pada tanggal 29 Juli 2008:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali/ PK dari pemohon Peninjauan Kembali/ PK : **PT. SAKA UTAMA DEWATA** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung/ MA tanggal 19 Juni 2006, Nomor: 02 PK/N/2006 jo putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 2005, Nomor: 022 K/N/2005;

3. Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK Ketiga oleh PT. Salindo Perdana Finance melawan PT Saka Dewa Utama dengan putusan Nomor 021 PK/PDT.SUS/ 2009 pada tanggal 25 Maret 2009 yaitu

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali/ PK dari pemohon Peninjauan Kembali/ PK : **PT SALINDO PERDANA FINANCE** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung/ MA 017 PK/N/ 2006 pada tanggal 29 Juli 2008 dan menguatkan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juni 2006, Nomor: 02 PK/N/2006

4. Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK Ketiga oleh PT. SAKA UTAMA DEWATA melawan:

- I. PT. Salindo Perdana Finance (DL)

Dengan Putusan Peninjauan Kembali/ PK Nomor: 021 PK/PDT.SUS/2009 pada tanggal 25 Maret 2009:

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali/ PK dari pemohon Peninjauan Kembali/ PK : **PT. SAKA UTAMA DEWATA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

F. Penemuan Permasalahan Hukum Pada Perdata Khusus, dengan Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK untuk kedua kalinya yang ditolak oleh Mahkamah Agung

Permasalahan hukum antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 787, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, yang dalam hal ini member kuasa kepada: DARYO MUKTIKNO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kota Bambu Selatan III No. 8, RT.001/RW.06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11420;

Melawan,

Ny. Wati bertempat tinggal di Dusun Banyuresmi, RT.02/RW.07, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2006, dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu Ny. AMAH, bertempat tinggal di Dusun Cibuntu, RT.01/RW.02, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;

1. Pengajuan Gugatan

Pengajuan Perkara Perdata dalam tingkat pertama dengan para pihak antara:

Ny. Wati, sebagai PENGGUGAT

Lawan,

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG, sebagai tergugat

Dengan Putusan Gugatan Nomor 221/PDT/G/2005/PN.BDG :

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Pengajuan Banding:

Pengajuan Perkara Perdata dalam tingkat banding dengan para pihak antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG, sebagai peming

Lawan,

Ny. Wati, sebagai terbanding

Dengan Putusan Nomor 291/Pdt./2006/PT.Bdg:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 2006 Nomor 221/PDT/G/2005/PN.BDG.

3. Pengajuan Kasasi:

Pengajuan Perkara Perdata dalam tingkat kasasi dengan para pihak antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG, sebagai Pemohon Kasasi

Lawan,

Ny. Wati, sebagai Termohon Kasasi

Dengan Putusan Nomor 1129 K/Pdt?2007:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUN, tersebut;

4. Pengajuan Peninjauan Kembali:

Berikut perincian perkara perdata dalam Peninjauan Kembali/ PK oleh PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 787, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, yang dalam hal ini member kuasa kepada: DARYO MukTIKNO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kota Bambu Selatan III No. 8, RT.001/RW.06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11420

1. Pengajuan Peninjauan Kembali yang pertama oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 787, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, yang dalam hal ini member kuasa kepada:

DARYO MUKTIKNO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kota Bambu Selatan III No. 8, RT.001/RW.06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11420; Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding;

Melawan,

Ny. Wati bertempat tinggal di Dusun Banyuresmi, RT.02/RW.07, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2006, dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu Ny. AMAH, bertempat tinggal di Dusun Cibuntu, RT.01/RW.02, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang; Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding;

Dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 183 PK/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT**, Cq. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA**, Cq. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I.No.1129 K/Pdt/2007 tanggal 12 Maret 2008;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para penggugatRekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Pengajuan Peninjauan Kembali yang Kedua Kalinya oleh Ny. Wati bertempat tinggal di Dusun Banyuresmi, RT.02/RW.07, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2006, dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu Ny. AMAH, bertempat tinggal di Dusun Cibuntu, RT.01/RW.02, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang; Pemohon Peninjauan Kembali;

Melawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 787, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, yang dalam hal ini member kuasa kepada: DARYO MUKTIKNO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kota Bambu Selatan III No. 8, RT.001/RW.06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11420; Termohon Peninjauan Kembali;

Peninjauan Kembali ini diajukan dengan memori Peninjauan Kembali sebagai Berikut:

1. Adanya Bukti Baru (Novum)

Bahwa, pada saat Perkara Gugatan ini dalam proses pemeriksaan persidangan baik di Tingkat Pengadilan Negeri Bandung dan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung maupun dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I belum pernah dipergunakan atau diajukan sebagai bukti oleh karena belum diketahui atau belum ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu berupa:

“SURAT PENJELASAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 5107/-1.755.21 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2012 TENTANG INFORMASI KEABSAHAN AKTA KELAHIRAN ATAS NAMA SOPHIE LOUISE SEBAGAIMANA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 100/1986 MENURUT STBLD 1849 NO. 25 YANG

DIBERIKAN OLEH PEGAWAI LUAR BIASA CATATAN SIPIL JAKARTA TANGGAL 14 MEI 1969” yang selanjutnya disebut sebagai: BUKTI PK-1

Sebagaimana dengan adanya bukti baru/ novum tersebut secara nyata sangat bertentangan/ kontradiktif dengan bukti maupun pertimbangan hukum dari putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 183 PK/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011

2. Adanya Kekhilafan Hakim

Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 183 PK/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 *a quo* terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam pengajuan Peninjauan Kembali ini, Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan dengan alasan Undang-Undang yang mengatur tentang Peinjauan Kembali telah menyatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.